

LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
dan DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami khaturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2019 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2019 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-714 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 550 – 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2021.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Mataram, Maret 2020

Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selaku Ketua PPID Distanbun Prov.NTB,



Ir. H. Prihatin Haryono, M.Si
NIP. 19670915 199403 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Bagian I: Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi	4
Bagian II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi	7
Bagian III : Layanan Informasi Publik	16
Bagian IV : Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi	17
Bagian V : Kendala Eksternal dan Internal	18
Bagian VI : Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	19
Bagian VII : Lampiran	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Regulasi PPID Distanbun Prov. NTB	5
Tabel 2. Sarana dan Prasarana PPID Distanbun Provinsi NTB.....	7
Tabel 3. Sumber Daya Manusia PPID Distanbun Provinsi NTB.....	8
Tabel 4. Daftar Informasi Publik yang telah didokumentasikan	10
Tabel 5. Jumlah Anggaran PPID Distanbun Provinsi NTB T.A. 2018.....	15
Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan dan Download DIP	16
Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi	17
Tabel 8. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi	18

Bagian I
GAMBARAN UMUM DAN
KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketebukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (goodgovernance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Provinsi guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai dasar pengelolaan PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun untuk kepengurusan PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada awal tahun 2018 Gubernur Nusa Tenggara Barat menetapkan Surat Keputusan 550-714 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 550 – 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2021 sebagai pembaharuan atas Surat Keputusan Gubernur tahun sebelumnya. Perubahan Keputusan Gubernur ini dilakukan karena adanya perubahan susunan dan kedudukan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan dalam keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB selaku atasan PPID Provinsi NTB Nomor:188.44/8/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

1.1. REGULASI

Tabel 1. Daftar Regulasi PPID Distanbun Provinsi NTB

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2015	Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah	2015
2.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 35 Tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.	2012
3.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018	Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi NTB	2018
4.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat 550 – 277 Tahun 2017	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 550 – 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2021.	2017
5.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat 550-714 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 550 – 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2021.	2018
5.	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor : 188.44/8/ 2013 Tahun 2013	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.	2013
6.	Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Set.841.1 / 36 / Distanbun / I / 2019 .	Pembentukan pejabat pengelola informasi, dokumentasi pembantu (ppid) Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. Tanggal, 9 Januari 2019.	2019

1.2. ARAH PRIORITAS PELAYANAN

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID di tahun 2019, prioritas pelayanan yang menjadi fokus kerja dari PPID Distanbun Provinsi NTB antara lain :

1. Mendokumentasikan DIP dari PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.
2. Melaksanakan SOP penanganan keberatan informasi publik.
3. Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID.
4. Melakukan update Informasi Publik.
5. Pembinaan SDM PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB serta Pelatihan SDM PPID bagi Operator SIP PPID Lembaga Pendidikan se-NTB.

Bagian II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1. SARANA DAN PRASARANA

Pada tahun 2019, untuk pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB menggunakan ruangan serta sarana dan prasarana yang terdapat pada Sekretariat PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Jalan Pejanggik Nomor 10 Mataram,

Tabel 2. Sarana dan Prasarana PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETERSEDIAAN	DIPERLUKAN
1	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	<ul style="list-style-type: none">- Meja Informasi (1 buah)- PC (2 buah)- Printer (1 buah)- Jaringan Internet- Buku Tamu & Catatan Permohonan- Telepon + fax (1 set)- Televisi (1 buah)- Lemari Arsip (1 buah)	<ul style="list-style-type: none">- Lemari Arsip (2 buah)
2	Sarana Sosialisasi & Dokumentasi Elektronik	<ul style="list-style-type: none">- <i>Website</i> Distanbun- Banner (2 buah)	<ul style="list-style-type: none">- Majalah/Bulletin PPID- Mobile wireless audio (1 buah)- Harddisk External (1 buah)

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Personil PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Set.841.1 / 36 / Distanbun / I / 2019 Tentang Pembentukan pejabat pengelola informasi, dokumentasi pembantu (ppid) Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. Tanggal, 9 Januari 2019.

Tabel 3. Sumber Daya Manusia PPID Distanbun Provinsi NTB

NO	KLASIFIKASI PERSONIL	TERSEDIA	DIPERLUKAN
1	Personil PPID Distanbun Provinsi NTB	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung Jawan PPID (1 orang) - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu) (1 orang) - Pengelolaan Informasi (1 orang) - Dokumentasi dan Arsip (1 orang) - Pelayanan Informasi (1 orang) 	- - -

Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP):

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Wewenang Pejabat Pengeloala Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)

- a. Menolak memberi informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi kepada unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik dan;
- e. Menugaskan unit kerja/komponen kerja untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

2.3. INFORMASI PUBLIK PADA SISTEM INFORMASI PPID PROVINSI NTB

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informatika dan Dokumentasi (PPID) merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat <http://distanbun.ntbprov.go.id>).

Adapun Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Distanbun Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Informasi Publik PPID Distanbun Provinsi NTB Tahun 2019

Nama Ketua PPID OPD		: Ir.H. Prihatin Haryono, M.Si									
Nama Unit/Satker yang menguasai		: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat									
No.	Jenis informasi	Ringkasan isi informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Informasi				Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	
						Wajib diumumkan secara berkala	Wajib diumumkan serta merta	Wajib disediakan setiap saat	Informasi yang dikecualikan		
1	2	3	4	5	6					7	
I Informasi Tentang Profil Badan Publik											
	1.1	Kedudukan domisili beserta alamat lengkap	Berdasarkan Peraturan Gubernur NTB No. 50 tahun 2016, tanggal 27 Desember 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Sekretariat	2016 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√				Selama Berlaku
	1.2	Ruang lingkup kegiatan	Program/Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan	Sekretariat	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√				Selama Berlaku
	1.3	Visi dan Misi	Visi dan Misi tertuang dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2018-2023	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√				Selama Berlaku
	1.4	Maksud dan Tujuan	Maksud dan tujuan tertuang dalam RENSTRA Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB Tahun 2018-2023	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√				Selama Berlaku
	1.5	Fungsi dan Tugas	Fungsi dan tugas tertuang dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2018-2023	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√				Selama Berlaku
	1.6	Struktur Organisasi	Struktur organisasi tertuang dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√				Selama Berlaku
	1.7	Gambaran umum setiap satuan kerja	Gambaran umum tertuang dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2018-2023	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√				Selama Berlaku
	1.8	Profil singkat pejabat struktural									
	a.	Nama;	Nama Pejabat Eselon II, III, IV dan Fungsional	Sekretariat	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√				Selama Berlaku
	b.	Nomor telepon dan sarana komunikasi satuan unit kerja yang bisa dihubungi;	Nomor telepon kantor pejabat ybs dan Alamat Karyawan/Karyawati Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB	Sekretariat	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√				Selama Berlaku
	c.	Alamat unit/satuan kerja pejabat;	Alamat unit kerja pejabat ybs.	Sekretariat	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√				Selama Berlaku
	d.	Laporan harta kekayaan bagi yang wajib melaksanakannya;	Laporan harta kekayaan pejabat Eselon II dibawa ybs sebagai laporan kepada pihak yang berwenang	Sekretariat	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√				Selama Berlaku
	e.	Latar belakang pendidikan;	Riwayat pendidikan pejabat ybs tercantum pada dokumen kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.	Sekretariat	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√				Selama Berlaku
	f.	Penghargaan yang pernah diterima	Penghargaan yang pernah diterima oleh pejabat ybs tercantum pada dokumen kepegawaian subbag Umum Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.	Sekretariat	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√				Selama Berlaku

II Ringkasan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Dalam Lingkup Badan Publik								
II.1	Nama program dan kegiatan;	Daftar nama-nama program dan kegiatan tercantum pada DIPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Sekretariat	2017 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√		Selama Berlaku
II.2	Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;	Penanggung jawab dan pelaksana program dan/atau kegiatan adalah Kasubag Penyusunan Program dan masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Sekretariat	2017 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√		Selama Berlaku
II.3	Target dan/atau capaian program serta kegiatan;	Target dan/atau capaian program serta kegiatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dins Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√		Selama Berlaku
II.4	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;	Jadwal pelaksanaan mulai awal tahun hingga akhir tahun anggaran tercantum pada Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√		Selama Berlaku
II.5	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah ;	Anggaran-anggaran program dan kegiatan tercantum pada DPA Distanbun Provinsi NTB	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√		Selama Berlaku
II.6	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas seperti proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran serta waktu untuk memberi masukan sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Sekretariat	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√		Selama Berlaku
II.7	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat di beberapa dokumen perencanaan seperti RKPD, RPJMD, RPJPD, Buku Data Dinamis, dan dokumen penunjang lainnya	Sekretariat	2017 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√		Selama Berlaku
III Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik Berupa Narasi Tentang Realisasi Kegiatan Yang Telah maupun Sedang Dijalankan Beserta Capaiannya, yang sekurang-kurangnya berisi:								
III.a	Penilaian kinerja Badan Publik yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut;	Penilaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Sekretariat	2017 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√		Selama Berlaku
III.b	Efisiensi dana yang dicapai;	Efisiensi dana yang dicapai sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Sekretariat	2016 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√		Selama Berlaku
III.c	Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan;	Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√		Selama Berlaku
III.d	Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan;	Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√		Selama Berlaku
III.e	Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik terkait;	Laporan umum dan keuangan tahunan Distanbu Provinsi NTB sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√		Selama Berlaku
III.f	Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan	Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan Distanbun Provinsi NTB sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√		Selama Berlaku
III.g	Data statistik tentang kegiatan bila ada	Data statistik tentang kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB bila ada sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Distanbun Provinsi NTB	Sekretariat	2016 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√		Selama Berlaku

IV	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:									
IV.a	Rencana dan laporan realisasi anggaran;	Rencana dan laporan realisasi anggaran Bakorluh Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) Distanbun Provinsi NTB	Sekretariat	2016 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	v				Selama Berlaku
IV.b	Neraca;	Neraca Bakorluh Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) Distanbun Provinsi NTB	Sekretariat	2016 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	v				Selama Berlaku
IV.c	Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;	Laporan keuangan Distanbun Provinsi NTB yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sebagaimana tercantum dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) Distanbun Provinsi NTB	Sekretariat	2016 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	v				Selama Berlaku
IV.d	Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;	Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (nama SKPD) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sebagaimana tercantum dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) SKPD	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	v				Selama Berlaku
IV.e	Daftar aset dan investasi.	Daftar aset dan investasi sebagaimana tercantum dalam SIMAK BMN Distanbun Provinsi NTB	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	v				Selama Berlaku
V	Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:									
V.a	Jumlah permintaan informasi yang diterima;	Jumlah permintaan informasi yang diterima sebagaimana tercantum dalam dokumen di Distanbun Provinsi NTB	PPID Distanbun Provinsi NTB	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	v				Selama Berlaku
V.b	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi;	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi sebagaimana tercantum dalam dokumen PPID Distanbun Provinsi NTB	PPID Distanbun Provinsi NTB	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	v				Selama Berlaku
V.c	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak;	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak sebagaimana tercantum dalam dokumen PPID Distanbun Provinsi NTB	PPID Distanbun Provinsi NTB	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	v				Selama Berlaku
V.d	Alasan penolakan informasi	Alasan penolakan informasi sebagaimana tercantum dalam dokumen PPID Distanbun Provinsi NTB	PPID Distanbun Provinsi NTB	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	v				Selama Berlaku
VI	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara penyelesaian sengketa informasi;	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara penyelesaian sengketa informasi PPID SKPD	PPID Distanbun Provinsi NTB	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy			v		Selama Berlaku

VII	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait	LPSE	Sekretariat	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√			Selama Berlaku
VIII	Informasi tentang program - program yang ada di Distanbun	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, Lomba Kelompok Tani Berprestasi , Lomba P3a/GP3A dan POPT Berprestasi	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√			Selama Berlaku
IX	Informasi tentang Luas tanam dan panen komoditi Tanaman Pangan,Hortikultura dan perkebunan	Luas tanam, luas panen tp (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, (horti : mangga,manggis, rambutan, durian, cabe, bawang merah , kakao, kelapa, mente, tembakau, tebu dll)	Sekretariat, Sub Bagian Program dan Pelaporan, Bidang Prod TP, Horti,Bun	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√			Selama Berlaku
X	Informasi tentang penggunaan lahan sawah dan bukan lahan sawah	Lahan sawah dan lahan bukan sawah	Sekretariat, Sub Bagian Program dan Pelaporan	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√			Selama Berlaku
XI	Informasi tentang harga komoditi tanaman pangan dan hortikultura	Harga grosir dan eceran komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Sekretariat, Bidang PPHP	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy	√			Selama Berlaku
XII	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:								Selama Berlaku
a	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan	Buku Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan Distanbun Provinsi NTB	Sekretariat	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy		√		Selama Berlaku
b	Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima	Buku Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima	Sekretariat	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy		√		Selama Berlaku
d	Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;	Dokumen Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Distanbun Provinsi NTB	Sekretariat, Sub bag program dan pelaporan	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy		√		Selama Berlaku
XIII	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Sekretariat dan Bidang-bidang	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy		√		Selama Berlaku
XIV	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;	Buku Agenda Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di Distanbun Provinsi NTB	Sekretariat	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy		√		Selama Berlaku
XV	Data perbendaharaan atau inventaris;	SIMAK BMN	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy		√		Selama Berlaku
XVI	Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;	Dokumen Rencana strategis dan rencana kerja Distanbun Provinsi NTB	Sekretariat	2018 Mataram	Hardcopy dan Softcopy		√		Selama Berlaku
XVII	Agenda kerja pimpinan satuan kerja;	Agenda kerja pimpinan satuan kerja Distanbun Provinsi NTB berupa rakor, pelatihan;	Sekretariat	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy		√		Selama Berlaku
XVIII	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya PPID Pembantu Distanbun Provinsi NTB	Sekretariat dan Bidang-bidang	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy		√		Selama Berlaku
XIX	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya Inspektorat	Inspektorat Provinsi	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy		√		Selama Berlaku
XX	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya Inspektorat	Inspektorat Provinsi	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy		√		Selama Berlaku
XXI	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Distanbun Provinsi NTB	PPID Pembantu Diperta TPH Provinsi NTB	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy		√		Selama Berlaku
XX II	Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja;	Dokumen Pangadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sekretariat	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy		√		Selama Berlaku
XXIII	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan melalui media	Sekretariat	2019 Mataram	Hardcopy dan Softcopy		√	13	Selama Berlaku

2.4. BESARAN ANGGARAN

Pelaksanaan pembangunan pertanian dan perkebunan mengacu pada Misi ke 5 (lima) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB tahun 2018-2023.

Untuk melakukan pemotretan terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB pada tahun 2019 diperlukan adanya penyampaian secara tertulis dalam bentuk laporan tahunan. Laporan tahunan merupakan petanggungjawaban dari seluruh rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut pembangunan pertanian di NTB dilaksanakan melalui dana yang bersumber dari dana APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana APBD tersebut tertuang di dalam DPA-APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB yang penggunaannya terdistribusi ke setiap bidang dan UPTD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB mengelola dana yang bersumber dari APBD Provinsi sebesar Rp. 138.559.049.463,-, Anggaran DPA SKPD tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.34.392.572.800,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.104.166.476.663,-. Jumlah Belanja Langsung (BL) pada DPA SKPD Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi NTB didominasi oleh anggaran kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan yang didominasi oleh anggaran aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB. Sebesar Rp. 59.079.500.000,- atau 69,08%.

Jumlah total serapan anggaran DPA - SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB di akhir tahun 2019 sebesar Rp. 132.257.878.276,- atau sebesar 95,45% dari total anggaran tahun anggaran 2019. Dari total tersebut untuk belanja tidak langsung tercapai serapan anggaran sebesar Rp. 32.679.105.711,- atau sebesar 95,02 % dari pagu anggaran belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung tercapai Rp. 99.578.772.565,- atau sebesar 95,60 %.

Tabel 5. Total Realisasi Serapan Anggaran DPA - SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB TA. 2019

KODE	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI			Sisa Dana (Rp)
			KEUANGAN		Fisik (%)	
			(Rp)	%		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	34.392.572.800	32.679.105.711	95,02	95,02	1.713.467.089
	Belanja Pegawai	34.392.572.800	32.679.105.711	95,02	95,02	1.713.467.089
	Gaji dan Tunjangan	26.271.572.800	25.312.519.036	96,35	96,35	959.053.764
	Tambahan Penghasilan PNS	8.080.000.000	7.366.586.675	91,17	91,17	713.413.325
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	41.000.000	-	-	-	41.000,000
5.2	BELANJA LANGSUNG	104.166.476.663	99.578.772.565	95,60	98,04	4.587.704.098
	DINAS INDUK	85.529.473.815	84.332.816.150	98,60	100,00	889.648.689
	UPTD - BPSB-P	1.408.043.640	1.385.227.989	98,38	100,00	22.815.651
	UPTD - BPT-P	1.892.940.280	1.762.861.658	93,13	100,00	130.078.622
	UPTD - BBI - P	5.007.276.300	4.657.589.064	93,02	100,00	349.687.236
	UPTD - BPSB - BUN	1.309.099.600	1.104.298.328	84,36	90,08	204.801.272
	UPTD - BP2TP	3.759.812.942	2.589.683.283	68,88	73,79	1.160.879.659
	UPTD - BPTP - BUN	97.141.114	97.141.114	100,00	100,00	-
	SMK - PP Mataram	1.141.803.800	947.631.827	82,99	100,00	191.095.688
	SMK - PP BIMA	1.209.293.780	1.184.521.750	97,95	100,00	24.772.030
	BAPELTANBUN	2.811.591.392	1.517.001.402	53,96	66,88	1.285.159.990
	TOTAL PAGU DANA SKPD DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB	138.559.049.463	132.257.878.276	95,45	97,29	6.301.171.187

Keterangan : pagu sesuai dengan APBD Perubahan TA. 2019

Dari realisasi serapan anggaran DPPA - SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB TA. 2019 terdapat sisa dana yang dikembalikan ke kas Negara (Silva) sebesar Rp. 6.301.171.187,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.713.467.089 (1,24) dan Belanja Langsung sebesar Rp 4.587.704.098,-, atau sebesar 3,31 % yang berasal dari sisa anggaran di masing-masing kegiatan dari masing – masing unit kerja antara lain UPTD BP2TP sebesar Rp. 1.160.879.659,- yang disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi antara lain : a) Pembangunan pagar keliling di Suranadi Timur tidak dapat terealisasi karena pihak keramapura suranadi mengklaim kepemilikan kebun, pengadaan mesin grinding/pencacah multifungsi tidak terealisasi karena pagu anggaran tidak sesuai harga pasar, pengadaan peralatan dan mesin laboratorium berupa pembelian mikroskop sebanyak 2 unit tidak terealisasi karena spesifikasi barang tidak ditemukan didalam e-catalog, dan UPTD Bapeltanbun sebesar Rp. 1.285.159.990,-.

Bagian III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP-PPID) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data statistik pengunjung Website PPIDserta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui Sistem Informasi Publik (SIP) maupun Meja Layanan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel. 6. Rekapitulasi jumlah permintaan informasi /Surat masuk dan Surat Keluar

No	Bulan	Jumlah Permintaan Data/Surat masuk	Jumlah Permintaan Data/Surat Keluar
1	Januari	128	
2	Februari	146	
3	Maret	202	
4	April	102	
5	Mei	107	
6	Juni	61	
7	Juli	238	
8	Agustus	116	
9	September	100	
10	Oktober	91	
11	November	1.392	
12	Desember	1.472	
	Total	4.155	

Bagian IV
PENANGANAN KEBERATAN DAN
SENGKETA INFORMASI

Sepanjang Tahun 2019, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 7. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

No	Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
		Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0

Bagian V

KENDALA INTERNAL EKSTERNAL

5.1. KENDALA INTERNAL

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB sepanjang pelaksanaan tugas di Tahun 2019. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Atasan dan pejabat struktural pada OPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB belum memahami pentingnya keberadaan PPID di OPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB sebagai perpanjangan tangan PPID Provinsi untuk supply data dan informasi. Hal ini terlihat dari masih minimnya pelayanan informasi PPID OPD di SIP-PPID Provinsi.
2. Operator Sistem Informasi pada PPID OPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB belum seluruhnya meng-update daftar informasi publik OPD-nya pada Website PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.

5.2 KENDALA EKSTERNAL

Kendala Eksternal yang dihadapi pada tahun 2019:

1. Masih adanya masyarakat yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat, dimana saat mengunjungi desk layanan, masyarakat yang hendak memohon informasi setiap saat tidak membawa kartu identitasnya.

Bagian VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Melihat permasalahan dan kendala pada Bagian V di atas, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terkait PPID bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi NTB untuk meningkatkan kapasitas petugas dan operator PPID Distanbun NTB..
2. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut Tentang PPID kepada masyarakat, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut dengan melakukan tatap muka langsung yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, sarasehan, workshop maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Distanbun Provinsi NTB dapat lebih maksimal kedepannya.